



Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa: Perwujudan Nilai Budaya dan Konsensus Dalam Keberagaman Indonesia

Ahmad Muhamad Musain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Desy Indah Pratiwi³, Salwa Rachmanda Putri⁴, Sabil An Naim⁵

¹Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam UIN Surakarta

²Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

³⁻⁵Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id^{1*}, ashfiy.anura@gmail.com², pratiwi112desy@gmail.com³,

salwarachmanda31@gmail.com⁴, salim.lnaem@gmail.com⁵

Korespondensi Penulis: mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id*

Abstract. Pancasila, as the ideology of the Indonesian nation, plays a crucial role in guiding both individual and collective life. As a worldview rooted in the nation's cultural values, Pancasila reflects local wisdom, acknowledged for its truth, and serves as a foundation for maintaining consistency in thought and action amidst Indonesia's plural society. This article employs a qualitative research method with philosophical and sociological approaches, utilizing literature reviews and critical analysis of various sources related to ideology and national values. The findings reveal that Pancasila possesses unique characteristics distinguishing it from other ideologies, particularly its ability to accommodate diversity without disregarding universal values. All principles of Pancasila are proven to be logical, relevant, and applicable in addressing social, political, and economic challenges, thereby reinforcing its role as an ideal guide for the Indonesian people. These findings affirm Pancasila's distinctiveness as a unifying ideology adaptable to the dynamics of the times.

Keywords: Ideology, Pancasila, National.

Abstrak. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki peranan penting dalam menuntun kehidupan individu dan kolektif masyarakat. Sebagai pandangan hidup yang lahir dari nilai-nilai budaya asli bangsa, Pancasila mencerminkan kearifan lokal yang diyakini kebenarannya dan menjadi dasar dalam menjaga konsistensi berpikir dan bertindak di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis dan sosiologis, melalui kajian literatur dan analisis kritis terhadap berbagai sumber terkait ideologi dan nilai-nilai kebangsaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari ideologi lain, yaitu kemampuannya mengakomodasi keberagaman tanpa mengesampingkan nilai-nilai universal. Seluruh sila Pancasila terbukti logis, relevan, dan aplikatif dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi, sehingga memperkuat perannya sebagai panduan hidup yang ideal bagi bangsa Indonesia. Temuan ini menegaskan keistimewaan Pancasila sebagai ideologi pemersatu yang adaptif terhadap dinamika zaman.

Kata kunci : Ideologi, Pancasila, Nasional.

1. PENDAHULUAN

Semua negara membutuhkan ideologi atau prinsip dasar yang menjadi landasan keberlangsungan hidupnya. Ideologi berfungsi sebagai gagasan fundamental yang memungkinkan suatu bangsa berkembang dan mencapai kesejahteraan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi ideologi resmi yang berakar pada nilai-nilai budaya, tradisi, dan konsensus bersama seluruh elemen bangsa. Hal ini menjadikan Pancasila bukan hanya sekadar dokumen historis, tetapi juga pedoman hidup yang terus relevan di tengah tantangan zaman.

Sebagai dasar negara, Pancasila mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang khas dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilainya mencakup pandangan hidup yang inklusif dan menghargai keberagaman. Kendati demikian, tidak jarang muncul perdebatan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila, yang sering kali menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi tugas bersama demi menjaga keutuhan bangsa.

Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi, dan masuknya ideologi asing, nilai-nilai dasar negara sering kali diabaikan atau disalahpahami. Kondisi ini tidak hanya membahayakan stabilitas sosial tetapi juga mengancam keutuhan bangsa yang berdiri di atas prinsip keberagaman. Menulis tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah upaya untuk mengingatkan kembali peran vitalnya sebagai alat pemersatu dan pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Pancasila memiliki peran krusial sebagai panduan nilai yang mengatasi konflik dan ketimpangan sosial. Sebagai ideologi, Pancasila mampu menjembatani keberagaman budaya, agama, dan tradisi yang ada di Indonesia. Namun, tanpa pemahaman yang mendalam, nilai-nilai Pancasila rentan tereduksi menjadi slogan kosong tanpa aplikasi nyata. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif bagaimana Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh individu maupun institusi.

Kajian ini juga bermaksud mengingatkan bahwa Pancasila lahir dari konsensus nasional yang tidak mudah. Melalui diskusi panjang dan mendalam antara para pendiri bangsa, Pancasila menjadi simbol persatuan yang berhasil merangkul perbedaan. Oleh karena itu, menulis tentang Pancasila merupakan upaya untuk melestarikan warisan luhur ini agar tetap relevan bagi generasi mendatang.

Selain itu, tulisan ini berfungsi sebagai kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur tentang ideologi bangsa. Kajian-kajian akademis yang menyoroti aspek historis, filosofis, dan praktis dari Pancasila sangat diperlukan untuk memberikan wawasan baru tentang relevansinya di era modern. Tulisan ini juga mengajak pembaca untuk merefleksikan perjalanan Pancasila dari masa ke masa, sekaligus mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilainya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *doktrinal*, bersifat *preskriptif*. membahas mengenai ideologi-ideologi Pancasila yang terdapat pada negara Indonesia dan asas-asas dalam ideologinya. Penelitian ini digunakan untuk melakukan kajian pada substansi dan struktur

pancasila, menganalisis ideologi secara *vertikal* dan *horizontal* yang memberi peta dan arah bagi masyarakat Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang - undangan (*statutei approach*).

Ideologi Pancasila yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Norma-norma sekunder yang digunakan berupa buku buku yang secara substansif relevan dengan tema dan masalah penelitian.

3. PEMBAHASAN

1. Pengertian Ideologi

Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani *idea* dan *logos*. *Idea* mengandung arti mengetahui pikiran, melihat dengan budi. Lalu kata *logos* memiliki makna gagasan atau pengertian. Jadi ideologi merupakan Kumpulan ide atau gagasan atau pemahaman. Adapun gagasan yang dimaksud adalah gagasan tentang masa depan, sehingga bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah ilmu tentang masa depan.

Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) seorang filsafat Prancis mengatakan ideologi merupakan cabang filsafat yang disebut *science de ideas*. Di Indonesia memiliki ideologi yakni “PANCASILA”. Berikut adalah sumber historis pancasila sebagai ideologi negara :

- **Pada masa pemerintahan Soekarno :**

digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Periode 1945-1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, namun dalam praktek kenegaraan sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Periode 1950-1959 mencampur ideologi Pancasila dengan ideologi liberal, sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Periode 1956-1965 yang dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin dikarenakan menganut supremasi Presiden.

- **Pada masa pemerintahan Soeharto :**

Pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan juga UUD 1945 secara murni serta konsekuen sebagai kritik kepada Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program andalannya yaitu P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Adapun nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 34 butir. Namun sayangnya pada keberlanjutannya, Pancasila dijadikan sebagai asas Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.

- **Pada masa pemerintahan Habibie :**

Pemerintahan Habibie menghapus P4 dan tidak menjadikan Pancasila sebagai program prioritas dikarenakan disibukan dengan ketidakstabilan kehidupan bidang politik baik di

dalam dan diluar negeri. (Nurwardani, dkk : 2017). Penghapusan P4 disertai pula dengan pembubaran BP7 (Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) sebagai lembaga yang bertanggungjawab memberikan penataran P4, melalui Keppres No 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No. 10 tahun 1979.

- **Pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid :**

Presden Abdurachman Wahid memandang Pancasila dalam dua aspek yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti oleh undang-undang dan produk-produk hukum yang ada. pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, aliran kepercayaan Kong Hu Cu diakui dan diberikan ruang untuk menjalankan peribadatannya. Pada masa pemerintahan beliau, diwarnai konflik Gerakan separatis di Aceh, Maluku, dan Papua.

- **Pada masa pemerintahan megawati :**

Menitikberatkan pemerintahannya kepada masalah ekonomi. Namun Pendidikan Pancasila memiliki posisi lemah dikarenakan tidak dicantumkan sebagai mata peilajaran wajib di jenjang pesekolahan.

- **Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono :**

belum adanya lembaga yang bertugas untuk mengawal Pancasila seperti yang diamanatkan dalam Keppres No 27 Tahun 1999. Namun SBY menandatangani Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menginstruksikan Pndidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di Perguruan Tinggi. (Nurwardani, 2016).

Konsep ideologi tidak kita teimukan dalam pemahaman sifat tuhan pra-islam (soediman, 2010: 123). Sifat tuhan pra-islam dalam pemahaman animisme-dinamisme, kemudian bergerak masa hindu budha yang menyembah banyak dewa tidak mengilhami nilai ideologi Ketuhanan yang Maha EIsa. Nilai ketuhanan yang maha esa jelas mengadopsi konsep bertuhan islam, hal ini begitu jelas dan tegas Tuhan berfirman dalam qur'an "tuhan kamu adalah tuhan yang maha esa" (QS. An-Nahl [16] 22), maka dari itu sila pertama yang menjiwai semua sila, yang mengandung nilai-nilai (kebenaran) mutlak yang tidak dapat di ingkari (non derogable rights) dan dalam konsep ini menyinggung tentang ideologi Pancasila sila pertama Selain membahas tentang pengertian ideologi dan ideologi sila pertama Pancasila menurut (Soediman, 2010: 123), ideologi suatu bangsa yang menjadi pandangan dan pegangan hidup masyarakatnya. Pancasila haruslah bersifat universal mencakup segala macam nilai-nilai budaya yang menjadi orientasi hidup oleh seluruh masyarakat nya.

Menurut kamus purwodarminto dalam bukunya Soegito AT dkk (2016:71) mulai diartikan sebagai harga dalam sesuatu (misalnya uang), angka kepandaian, kadar, mutu, sifat-sifatnya atau berguna bagi kemanusiaan. Hal tersebut merujuk pada sila ke-2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang memuat tentang segala bentuk unsur kemanusiaan yang adil dan beradab yang dijadikan sebagai asas-asas kehidupan. Kesadaran manusia tersebut harus dilakukan agar menjadi semangat membangun keludupan Masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta kita harus memiliki sikap toleransi agar hidup menjadi damai. Karena keseluruhan isi Pancasila merupakan satu kesatuan, salah satu cita kesatuan yang terdapat dalam Pancasila adalah cita integralistik yang secara khusus tertuang dalam sila ke-3 yang berbunyi "Persatuan Indonesia". Menurut Darmodihardjo (1979). persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan, bangsa yang mendiami wilayah Indonesia Bersatu karena disorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang Merdeka dan berdaulat.

Sebagai warga negara dan warga Masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang tertuang dalam sila ke-4 Pancasila yang berbunyi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Menurut TAP MPR Nomor I/MPR/2023 yaitu :

1. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap Keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
2. Didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi dan golongan.
3. Dengan iktikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil Keputusan bermusyawarah.
4. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
5. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Menurut Suyahmo 2015 bahwa pelaksanaan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Sila ke-4 ini selalu mengutamakan musyawarah demi kepentingan Bersama dan diliputi oleh semangat kekeluargaan, serta menerima semua ide musyawarah. Nilai-nilai tersebut merupakan versi Eka Prasetya Pancakarsa, tafsir Pancasila yang sering didengungkan pada masa orde baru

Adil dalam semua keputusan dan merata dalam bermasyarakat. Yudi Latif dalam sidang Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (2011) memberikan pendapat bahwa sila ke-5 yang berbunyi "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" adalah perwujudan yang paling nyata dari prinsip-prinsip Pancasila.

Prinsip keadilan yaitu inti dari moral ketuhanan. Landasan inti perikemanusiaan, rangkaian persatuan, dan matrasa kedaulatan rakyat. Dengan kata lain keadilan social merupakan perwujudan sekaligus cerminan dari kelima sila dalam Pancasila lainnya.

Tipe-Tipe Ideologi

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka" (Kaelan, 2010:119) Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu teknologi dan perkembangan masyarakat atau bisa dikatakan bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka bukan ideologi tertutup.

Adapun tipe-tipe ideologi diantaranya sebagai berikut:

1. Ideologi Terbuka

Ideologi terbuka adalah ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa. Ideologi ini memiliki beberapa nilai yang mengikuti perkembangan zaman diantaranya adalah:

- a. Nilai dasar, merupakan nilai yang tidak dapat berubah sepanjang zaman
- b. Nilai instrumen, yaitu nilai yang memiliki sifat dinamis sesuai perkembangan zaman.
- c. Nilai praktis, merupakan nilai yang dilakukan secara nyata

Nilai-nilai dalam ideologi terbuka bukan dipaksakan dari luar, tetapi nilai ini digali dari kekayaan moral, rohani, budaya yang dimiliki dan melekat pada Masyarakat.

Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan hidup untuk menentukan tujuan atau norma politik dan sosial kebenarannya tidak boleh dipersoalkan lagi Ideologi tertutup bersifat dimutlakkan, pelaksanaannya dipaksakan, tidak menerima pandangan baru dan menuntut kepatuhan. Ideologi tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut

- a. Tidak hanya mengakui kebenaran nilai dan prinsip dasar saja, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional.
- b. Ideologi menjadi cita-cita suatu kelompok saja, bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat.
- c. Tidak bersumber dari masyarakat, melainkan dari pikiran elit yang harus dipropagandakan kepada masyarakat. Pandangan yang mulai bermunculan dan berkembang dalam masyarakat dinilai tidak sesuai dengan ideologi tersebut.

- d. Ideologi tertutup menentang tradisi Demi ideologi tertutup. Masyarakat wajib melakukan pengorbanan- pengorbanan
- e. Totaliter (menyangkut seluruh bidang kehidupan) keberagaman, kebudayaan serta agama dalam Masyarakat dikurangi atau dibatasi bahkan dihilangkan Ideologi tertutup ini menganggap agama akan membuat penganutnya lebih kebal terhadap pengaruh ideologi

Kedua ideologi tersebut perlu memiliki dimensi fleksibilitas untuk menyongsong kebutuhan bangsa dan perkembangan dunia. Seperti diketahui, ideologi berkembang dari pandangan hidup suatu bangsa, sehingga lebih jelas perumusannya. Namun, ideologi dapat memiliki beberapa sisi negatif, antara lain yaitu ideologi cenderung melebih-lebihkan sudut pandanganya.

bahkan tidak jarang menjadi doktriner, dalam arti cenderung mempermainkan seluruh kebenaran, atau sering memberikan ruang bebas bagi pengembangan pemikiran terhadapnya.

Keadaan demikian, akan dapat berubah menjadi sumber timbulnya faktor disintegrasi, tidak ada lagi ruang gerak bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat akan merasa tertinggal. Keadaan demikian, merupakan suatu kondisi yang bukan saja tidak sesuai dengan laju perkembangan zaman. Oleh karena itu, bagaimanapun dipertahankan, maka pada saatnya mengakibatkan terjadinya perpecahan bangsa dan disintegrasi nasional.

Macam-Macam Ideologi

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, pola pikir serta cara pandang manusia terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat berbagai ideologi. Adapun macam-macam ideologi yaitu:

1. Kapitalisme

Menurut adam smith ideologi kapitalisme merupakan ideologi yang dikenal dunia, ideologi ini dipopulerkan oleh beliau Kapitalisme berasal dari kata kapital yang berarti modal. Kapitalisme merupakan suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal dapat melaksanakan usahanya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Modal yang dimaksud antara lain berupa uang, tanah, atau suatu bentuk kekayaan tertentu.

2. Liberalisme

Ideologi liberalisme berasal dari kata liber yang artinya bebas. Liberalisme merupakan usaha perjuangan menuju kebebasan, liberalism ini menitik beratkan hak asasi yang melekat pada diri manusia sejak lahir.

Rousseau dalam bukunya *Du Contract Sosial* menyatakan bahwa manusia dilahirkan bebas. Hak dasar ini dijelaskan tidak ada pihak lain yang boleh mengambilnya hak termasuk termasuk penguasa kecuali bila ada persetujuan dengan pihak yang bersangkutan. Liberalism juga dilatar belakangi oleh John Locke dia beranggapan bahwa hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak milik, dan kemerdekaan Hak-hak berikut tercakup dalam hak politik

3. Sosialisme

Ideologi sosialisme ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19 yaitu pada tahun 1827 Menurut Robert Owen dan Saint Simon, sosialisme lahir sebagai akibat perkembangan kapitalisme yang menjadikan kebersamaan sebagai tujuan hidup dan mengutamakan segala aspek di kehidupan Bersama manusia untuk kepentingan Bersama. Hal ini karena prinsip yang mendasar yaitu sama-sama akan mengutamakan segala kepemilikannya secara Bersama-sama dan tidak mengakui adanya kepemilikan individu

Adapun ciri khas sosialisme sebagai berikut

1. Hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas
2. Mencapai kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis.
3. Berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perbaikan Nasib buruh dengan luwes secara bertahap.
4. Negara diperlukan selama-lamanya.

Sejak abad ke-19 sosialisme selalu berkembang ke banyak paham-paham yang berbeda seperti anarkisme, komunisme, fasisme, leninisme, maupun maoisme.

4. Anarkisme

Menurut Mikhail Bakunin (1814-1876) anarkisme sangat berhubungan dengan kekerasan, sehingga menurutnya kebebasan individu hanya dapat diwujudkan secara sepenuhnya setelah negara dan Lembaga-lembaga penopangnya dapat dihancurkan. Maka dari itu ideologi ini menganggap bahwa negara merupakan suatu gangguan dan tidak perlu ada. Dalam sejarahnya para anarkis seringkali menggunakan kekerasan sebagai cara yang ampuh untuk memperjuangkan ide-ide nya. Digunakannya cara kekerasan ini dalam anarkisme sangatlah berhubungan dengan gerak mereka yang mengesahkan kekerasan, penyerangan, pengrusakan.

5. Komunisme

Ideologi komunisme yang dilahirkan oleh Karl Marx (1770- 1831) menurutnya kaum buruh perlu membuat revolusi atau perubahan secara mendadak untuk merebut kekuasaan negara dari golongan kapitalis. Dengan cara ini, kaum buruh akan menjadi pengusaha dan dapat mengatur negara. Komunisme sendiri merupakan sebuah ideologi dunia yang muncul sebagai reaksi dari kapitalisme dalam usaha merebut dan mempertahankan kekuasaannya. Komunisme melakukan Tindakan- tindakan berikut :

- a) Menghalalkan segala cara untuk mencapaitujuan
- b) Menciptakan permasalahan untuk mengadu domba golongan- golongan tertentu.
- c) Komunisme tidak mengakui adanya tuhan, tapi lebih mengutamakan materi.
- d) Komunisme bercita-cita menciptakan masyarakat tanpa kelas. Pertentangan kelas, hak milik pribadi, dan pembagian kerja dianggap akan menjauhkan dari suasana hidup yang aman dan tentram.

Selain Tindakan-tindakan tersebut ada juga prinsip-prinsip komunisme yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai berikut:

- a) pemerintah dipimpin oleh satu partai yaitu partai komunis. Pemerintah bersifat diktator proletariat
- b) Hak milik pribadi dihilangkan, tidak ada kebebasan demokrasi, dan menolak keadilan sosial.
- c) Hak milik pribadi atas alat-alat produksi
- d) Pengelolaan ekonomi dalam komunisme sebagai berikut :
 1. Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan.
 2. Perekonomian ditentukan dan dikuasai negara.
 3. Bebas dari persaingan ekonomi pasar
 4. Seluruh harta kekayaan menjadi milik negara.
 5. Negara hanya diperlukan untuk sementara waktu saja selama belum mencapai kesejahteraan

6. Fasisme

Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengutamakan kekuasaan secara menyeluruh, tanpa adanya demokrasi. Paham ini menomorsatukan bangsa kita sendiri memandang rendah bangsa lain. Dapat pula dikatakan, fasisme merupakan suatu sikap nasionalisme yang berlebihan. Fasisme muncul pertama kali di Italia, dalam wujud Benito Mussolini pada abad ke-20. Adapun ciri ideologi fasisme sebagai berikut:

a. Mengingkari derajat kemanusiaan

Bagi fasisme, keberadaan pria melebihi wanita, militer melebihi sipil, anggota partai melebihi bukan anggota partai. Dengan demikian fasisme tidak pernah mengaku adanya persamaan kedudukan dan kemanusiaan tapi lebih mengutamakan kekuatan.

b. Ketidakpercayaan pada kemampuan nalar

Kenyakinan yang berlebihan adalah sesuatu yang sudah tentu benar.

c. Pemerintahan oleh kelompok elit

Pemerintahan harus dipimpin oleh beberapa orang elit atau bangsawan. Jika terdapat pertentangan pendapat keinginan bangsawan lah yang berlaku.

d. Perilaku bertumpu pada kekerasan dan kebohongan

Jika ada yang berusaha menentang kekuasaan negara, maka akan dianggap musuh yang harus dimusnahkan. Menurut ideologi ini, kebenaran terletak pada perkataan yang berulang-ulang bukan pada kebenaran sebenarnya.

e. Totaliterisme

Fasisme bersifat total untuk menyingkirkan kaum yang dianggap lebih rendah, seperti wanita. Pengawasan yang ketat selalu dilakukan. Bila muncul pihak penentang, maka totaliterisme diperlihatkan dengan cara kekerasan.

f. Rasialisme dan Imperialisme

Fasisme menganggap ras mereka lebih unggul daripada ras lain. Oleh karena itu, ras lain harus tunduk dan dikuasai. Akibatnya, kondisi ini menimbulkan semangat imperialisme (menjajah).

g. Menentang hukum dan Keterlibatan Internasional.

Fasisme memilih perang sebagai posisi tertinggi dalam peradaban manusia.

FUNGSI IDEOLOGI

Menurut Soerjanto Poespowardojo (1992) menemukan ada enam fungsi ideologi yaitu

1. Memberikan struktur kognitif ialah keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian alam sekitar

2. Memberikan orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
3. Memberikan norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
4. Memberikan bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya
5. Memberikan kekuasaan yang mampu mendorong seseorang untuk mencapai tujuan
6. Memberikan Pendidikan bagi Masyarakat untuk memahami serta mengatur tingkah lakunya sesuai dengan norma-norma.

Makna Ideologi

Pada tahun 1796 Tracy memahami bahwa istilah ideologi merupakan "ilmu gagasan" untuk mengembangkan sistem gagasan yang rasional.

Dia sendiri memahami ideologi sebagai filosofi liberal yang membela kebebasan individu, property, pasar bebas, dan batasan Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki makna dan peran sebagai berikut:

Makna Pancasila sendiri merupakan ideologi terbuka yang berarti mampu mengikuti perkembangan zaman, dinamis, dan hasil konsensus masyarakat. Pancasila juga menjadi dasar negara dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran Pancasila berperan sebagai Pemersatu dalam integrasi nasional. Pancasila dapat menjadi acuan bersama untuk memecahkan perbedaan dan pertentangan politik. Sumber inspirasi dan motivasi. Nilai-nilai Pancasila dapat memotivasi individu dan masyarakat untuk bekerja sama dan mengatasi perbedaan. Pedoman etika dan moral. Pancasila mendorong perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, toleransi, dan saling menghormati. Landasan kokoh yang mengukuhkan identitas kolektif. Pancasila meresap dalam setiap aspek kehidupan dan meneguhkan persatuan di tengah keragaman budaya, suku, dan agama.

Menurut Wahyu, W (2015) Nilai-nilai pancasila bersifat fundamental, mutlak, universal dan abadi dan nilai-nilai tersebut merupakan nilai dari leluhur budaya masyarakat yang tersebar di seluruh nusantara. Nilai-nilai pancasila sebelum Negara terbentuk dasarnya terdapat fragmentaris kebudayaan yang tersebar di seluruh Indonesia baik pada abad ke dua atau pada abad sebelumnya, masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkulturasi dengan beberapa budaya lain. Nilai-nilai dari pancasila ini perlu diimplementasikan dalam berbagai bidang demi menjaga eksistensi bangsa Indonesia diantaranya:

1. Implementasi Pancasila dalam Bidang Politik.
2. Implementasi Pancasila dalam Bidang
3. Ekonomi.
4. Implementasi Pancasila dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan.
5. Implementasi Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya.
6. Implementasi Pancasila dalam Bidang Pendidikan.

Pada dunia pendidikan jika menerapkan nilai-nilai pancasila dapat dilaksanakan pada momen tertentu yang tepat. Seperti pada peringatan sumpah pemuda, hari kemerdekaan, hari pahlawan, dan hari-hari besar lainnya.

Hal ini dapat mendorong dan mengajak siswa untuk belajar dengan bersungguh-sungguh agar dapat mengharumkan dan membanggakan negeri tercinta kelak. Hal ini juga dapat menanamkan kecintaan siswa kepada negaranya sendiri serta bangga menjadi anak Indonesia. Ade, L. P. dkk (2020).

Peranan Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Menurut Octojo Oesman (1993/1994), ideologi pancasila berperan sebagai ideologi nasional, maka perlu kajian bagaimana upaya yang harus dilaksanakan agar ideologi senantiasa dapat berperan sebagai faktor yang berpengaruh atau integratif. Oleh karena itu, perlu memiliki tiga dimensi, yaitu:

1. Dimensi idealis.
2. Realis,
3. Fleksibilitas.

Pertama-tama dapat dibedakan antara ideologi yang memiliki kerangka yang ideal dan menjunjung nilai-nilai moral, etik yang luhur dalam substansi maupun implementasinya. dengan ideologi yang tidak memilikinya.

Pancasila adalah ideologi bangsa dan dasar negara Indonesia disebabkan memiliki nilai-nilai sebagai pegangan berbangsa dan bernegara. Pancasila, sebagai ideologi, dijadikan sebagai pegangan untuk mencapai suatu tujuan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Soeprapto (1993/1994) mengatakan bahwa ideologi tidak hanya merupakan suatu penegasan ulang dari pola pikir yang dinamis dari para pendiri negara Indonesia dalam tahun 1945. Tetapi juga merupakan suatu kebutuhan dalam dunia modern yang berubah dengan cepat. Pancasila sebagai ideologi, di satu pihak kita diharuskan mempertajam kesadaran akan nilai-nilai dasarnya yang bersifat abadi

Hakikat Pancasila

Terdapat kecenderungan perubahan cara pandang terhadap hakikat manusia di Indonesia. Masyarakat Indonesia cenderung materialistis, idealis, dogmatis, hedonistik dan individualistis. Maraknya tindakan pelanggaran hukum, terorisme, penolakan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Bangsa Indonesia merupakan bukti adanya perubahan cara pandang terhadap hakikat manusia di Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Memahami hakikat manusia Pancasila menurut Notonagoro, memahami hakikat manusia Pancasila menurut Notonagoro dalam perspektif eksistensialisme Soren Aabye Kierkegaard dan memahami relevansi hakikat manusia Pancasila dalam pengembangan karakter Bangsa Indonesia

Hakikat Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Isi hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki dimensi dan urgensi yang amat penting untuk diresapi dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dasar negara Pancasila merupakan pedoman, pandangan hidup, serta ideologi bangsa Indonesia.

Menurut paparan Siti Tiara Maulia melalui tulisan "Pemahaman Konsep Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Bangsa" dalam Seminar Nasional: Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila di Era Reformasi, ideologi Pancasila selanjutnya disosialisasikan secara sederhana, jelas, praktis, dan terus menerus baik dalam pemikiran, perkataan, perilaku, dan keteladanan.

Hal ini perlu dilakukan untuk menarik dan mengetuk hati setiap rakyat Indonesia demi pemahaman mengenai Pancasila agar bisa diamalkan dalam kehidupan. Ideologi Pancasila, lanjut Siti Tiara Maulia dalam tulisannya, tetap menghormati hak individu dan martabat manusia.

Saat ini dan pada perkembangan ke depan, ideologi Pancasila tidak bisa lagi ditanamkan melalui cara-cara indoktrinasi, melainkan menggunakan pendekatan persuasif dan dialog sehingga mampu berperan dan membimbing semua warga negara.

terbitan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi sebagai berikut:

a. Dimensi Realitas

Mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai nyata yang hidup di dalam masyarakat.

Artinya, nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Selain itu, nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.

b. Dimensi Idealitas

Mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita.

c. Dimensi Fleksibilitas

Mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila.

Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakini untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat.

Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Masih menurut Bulu Ajar Mata Kuliah Wajib Unsun Pendidikan Pancasila (2016). peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Adapun urgensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Ideologi sebagai penuntun warga negara

Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya.

Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelangganya.

b. Ideologi Sebagai Penolakan Terhadap Nilai-nilai yang Tidak Sesuai dengan Pancasila

Pancasila sebagai ideologi negara pernah mengalami berbagai guncangan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggeser Pancasila dengan mengganti ideologi negara. Sebagai contoh adalah kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melahi kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan

c. Nilai-Nilai yang Terkandung pada Lima Sila Pancasila

Mengutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan (2009: 7-8), dijelaskan bahwa setiap sila yang terdapat pada Pancasila mencerminkan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yakni:

- Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya
- Sila 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan bahwa seluruh komponen masyarakat Indonesia saling menghormati dan menjaga sesama tanpa memandang latar belakang suku, ras, maupun agamanya.
- Sila 3. Persatuan Indonesia, mencerminkan bahwa bangsa Indonesia meskipun memiliki pemberdayaan budaya, latar belakang, kultur, tradisi, keyakinan, dan suku harus bersatu sebagai satu kesatuan yang utuh, yaitu Bangsa Indonesia
- Sila 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menempatkan kedaulatannya di tangan rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama dihadapan hukum dan saat menyampaikan pendapat
- Sila 5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerminkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam bidang kehidupan secara menyeluruh, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan lain-lain.

Tujuan Hakikat Sila - Sila Pancasila

1. Memberikan pedoman nilai moral dan filosofis untuk membuat keputusan dan merancang kebijakan di semua tingkatan pemerintahan.
2. Membantu menyatukan masyarakat Indonesia dengan menekankan persatuan, keberagaman, dan saling menghormati, menciptakan rasa identitas bersama.
3. Menciptakan landasan etika bagi perilaku individu dan masyarakat, mendorong nilai-nilai seperti keadilan, belas kasihan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.
4. Mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat, menggarisbawahi pentingnya musyawarah, perwakilan, dan keputusan bersama.
5. Menekankan keadilan sosial dan distribusi sumber daya yang merata, menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.
6. Mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia, merayakan keberagaman dan mendukung pelestarian warisan budaya.
7. Sila-sila Pancasila tercantum dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945), menjadi landasan hukum bagi pembentukan undang-undang, kebijakan, dan lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. A. (2016). Reformasi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi.
- Al-Attas, S. M. N. (1978). Islam and secularism. ISTAC.
- Anshari, S. (1987). Pemikiran politik Indonesia. UI Press.
- Anugrah, D. (2023). Pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka beserta perannya.
- Bakry, H. (2022). Relevansi nilai Pancasila dalam era digitalisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(3).
- Darsono, J. (2020). Revitalisasi Pancasila dalam era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(1).
- Hidayat, K. (2013). Membumikan Pancasila di era globalisasi. Mizan.
- Issha, H. (2022). Makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia.
- Iswara, N. R. (2022). Hakikat Pancasila: Dimensi dan urgensinya sebagai ideologi negara.
- Karl Marx. (2013). Pancasila sebagai ideologi yang khas dan identitas bangsa.
- Kholida, Q. (2024). Pancasila sebagai ideologi negara RI: Ini kedudukan dan fungsinya.
- Kuntowijoyo. (2001). Identitas politik bangsa. Pustaka Pelajar.

- Latif, Y. (2011). Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila. Gramedia.
- Maksum, R. (2023). Pancasila: Fungsi dan peranannya.
- Monica Ayu Caesar Isabela. (2022). Pancasila sebagai ideologi.
- Mukhlis, M. (2024). Menemukan kembali Pancasila sebagai ideologi.
- Nora, I. (2013). Ideologi Pancasila: Pengertian, fungsi, makna, dan dimensi.
- Notonagoro. (1981). Pancasila: Dasar falsafah negara. Bina Aksara.
- Pusdatin. (2021). Internalisasi nilai-nilai Pancasila menguatkan NKRI.
- Revormasi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi. (2016).
- Soekarno, I. (1985). Pidato 1 Juni 1945. Sekretariat Negara.
- Tyas, D. C. (2019). Mengenal ideologi negara.
- Wahyudi, M. (2021). Transformasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Jurnal Politik dan Hukum, 12(2).
- Yudi, L. (2011). Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila. Gramedia.